

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Fokus Indonesia saat ini mengarah pada pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang sejatinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa harus mengabaikan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi masa depan. Artinya, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kelestarian lingkungan yang merupakan penopang kehidupan manusia. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diharapkan mampu meningkatkan mutu kehidupan melalui pemeliharaan lingkungan hidup. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya melindungi bumi dari kerusakan dan kemerosotan ekosistem agar tercipta suatu kehidupan dengan keseimbangan yang dinamis baik secara fisik, ekonomi, dan sosial. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tentu melibatkan setiap unsur masyarakat di dalamnya sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia, yakni meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk setiap tahun yang diiringi dengan kebutuhan yang semakin kompleks pula. Sejujurnya, fenomena seperti ini memang sudah menjadi hal klasik yang tidak bisa kita hindari di negara berkembang.

**Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk di Indonesia**



Sumber: <https://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 19.38 WIB).

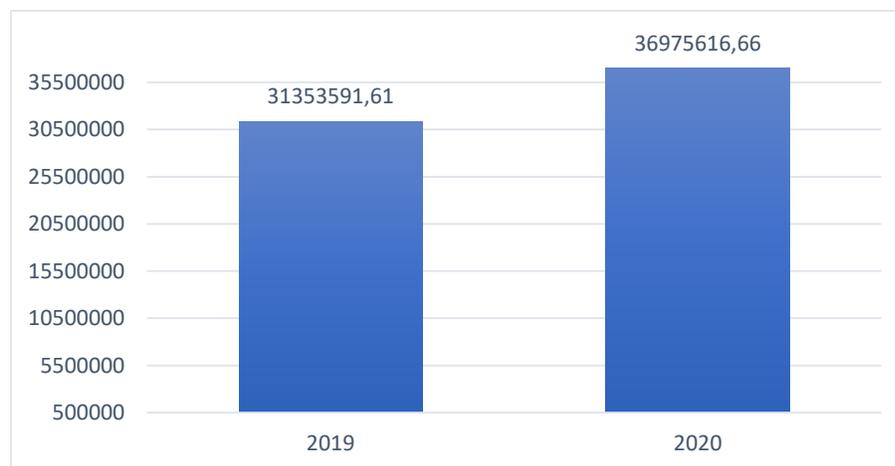
Gambar 1.1 di atas merupakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 dari hasil Sensus Penduduk pada bulan September tahun 2020 yang lalu dengan angka sebesar 270,20 juta jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2020 dibandingkan dengan Sensus Penduduk tahun 2010 terpantau mengalami penambahan penduduk sebesar 32,56 juta jiwa. Fakta lain menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah populasi penduduk terbesar keempat di dunia setelah Negara China, India dan Amerika Serikat (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/15/indonesia-peringkat-ke-4-negara-berpenduduk-terbanyak-dunia>, diakses pada 5 Mei 2021 pukul 17.37 WIB). Berkaca dari hal ini, tentu Indonesia tidak akan dapat terhindar dari segala bentuk persoalan lingkungan, khususnya masalah sampah yang akan selalu menjadi perhatian khalayak umum. Sampah ialah zat ataupun benda yang bersifat organik

dan anorganik yang berasal dari setiap aktivitas manusia. Kepadatan penduduk yang bertambah setiap tahun akan selalu diikuti dengan meningkatnya hajat beserta keperluan manusia yang semakin kompleks. Bermula dari fakta tersebut maka dapat dipastikan jika usaha untuk mencukupi kebutuhan manusia baik itu yang berasal dari pemakaian produk maupun pola konsumsi masyarakat untuk bertahan hidup sehari-hari juga akan bertambah. Maknanya, manusia akan selalu menghasilkan sampah yang menyebabkan volume sampah di negeri ini semakin meningkat.

Permasalahan sampah ternyata bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan genting yang melanda negeri ini, hal serupa juga terjadi di Negara India yang menempati posisi sebagai negara yang memiliki populasi penduduk tertinggi kedua di dunia. Sebuah penelitian lapangan di wilayah kota kecil India Selatan pada tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa sekitar setengah dari sampah di daerah tersebut yang tidak dapat didaur ulang dibuang ke tempat pembuangan alam seperti di dasar laut, danau, sungai dan lapisan bawah tanah. Dalam produksi sampah secara global, India menempati urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan China (White, 2017:272). Menurut Hoornweg, et al (dalam White, 2017:272) bahkan diprediksi pada tahun 2030 mendatang, Negara India juga akan mengalami kenaikan pesat 2,7 kali lipat penambahan volume limbah padat. Sungguh ironis bukan? Ternyata permasalahan sampah memang menjadi masalah publik yang sangat krusial di negara-negara lain.

Berkaca dari negara lain yang ternyata juga memiliki permasalahan sampah seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah membawa kabar baik, yakni pada Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sebagai *platform* pengelolaan sampah terintegrasi yang dapat diakses publik (<https://www.cloudcomputing.id/berita/klhk-luncurkan-sipsn-berbasis-big-data>, diakses pada 1 Juni 2021 pukul 14.37 WIB). Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sebagai website terpadu, data berupa jumlah timbulan sampah yang berasal dari aktivitas manusia dapat kita ketahui seperti pada Gambar 1.2 yang menjelaskan bahwa timbulan sampah skala nasional meningkat sebesar 36,9 juta ton/tahun pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 31,3 juta ton/tahun.

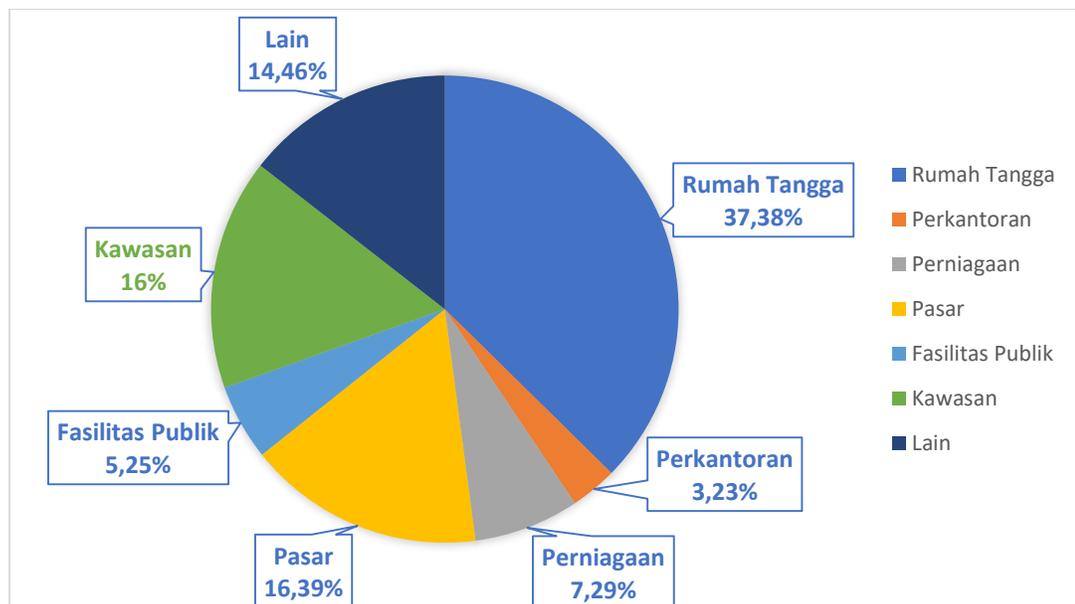
**Gambar 1. 2 Jumlah Timbulan Sampah Skala Nasional (Juta Ton/Tahun)**



Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 14.24 WIB).

Sesuai data di atas, timbulan sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis sumber sampah yang berasal dari banyaknya aktivitas masyarakat, mulai dari sampah rumah tangga, sampah kawasan, sampah industri, sampah perdagangan dan perkantoran, dan sampah dari fasilitas publik. Dengan demikian di bawah ini terdapat Gambar 1. 3 yang menunjukkan bahwa kategori sumber sampah nasional paling besar persentasenya dihasilkan oleh sampah rumah tangga, yaitu 37,38%. Sementara pada posisi kedua berasal dari sampah yang dihasilkan pasar tradisional sebesar 16,39%. Kemudian, di urutan ketiga, yaitu kawasan yang menghasilkan sampah sebesar 16%. Berdasarkan data tersebut, sampah rumah tangga adalah penyumbang utama timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat.

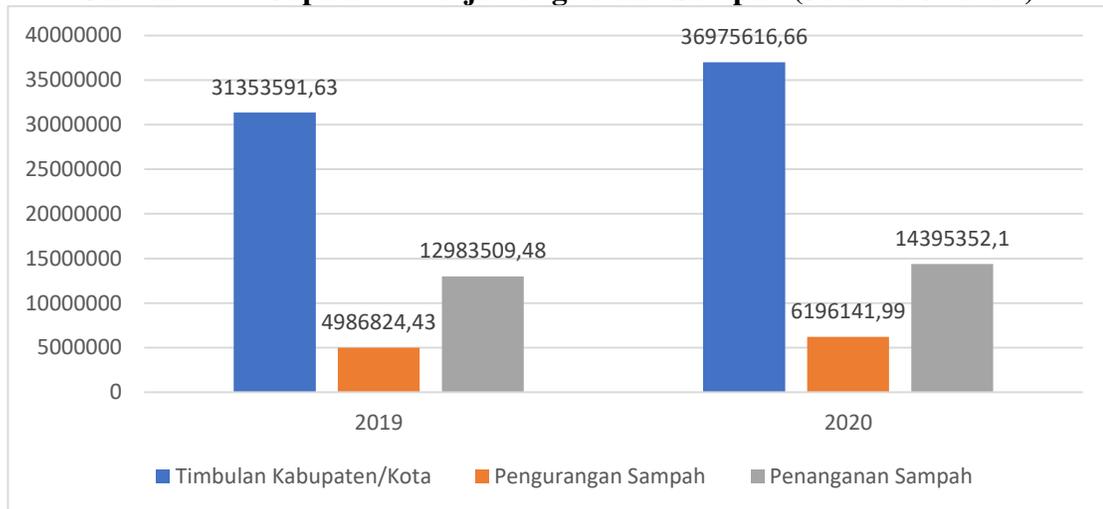
**Gambar 1. 3 Sumber Sampah Nasional**



Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 14.29 WIB).

Sumber sampah dari berbagai kegiatan masyarakat tentu harus segera dikelola dengan baik untuk dapat meminimalisir volume timbulan sampah setiap tahunnya. Selain itu, pengelolaan sampah harus sesuai dengan teknik dan metode yang benar agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Bukan hanya itu saja, upaya pengelolaan sampah juga harus memperhatikan kesehatan masyarakat sebagai salah satu unsur yang langsung hidup berdampingan dengan alam. Namun, sudah menjadi budaya masyarakat bahwa sampah selama ini langsung diangkut menuju pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sehingga hanya sebagian kecil sampah yang melewati proses daur ulang serta cenderung membebani TPS dan TPA. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mengubah mekanisme dari sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah yang terdiri dari upaya pengurangan dan penanganan sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah yang biasanya diangkut dan dibuang ke TPS dan TPA hanya menjadikan beban saja maka dari itu sampah harus melalui proses pengelolaan sampah mulai dari tingkat hulu sampai ke hilir (Pramadianto & Widowati, 2016:4).

**Gambar 1. 4 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah (Juta Ton/Tahun)**



Sumber: <http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 14.25 WIB).

Data dari Gambar 1.4 di atas adalah capaian kinerja pengelolaan sampah yang terdiri dari 291 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Hanya sekitar 4,9 juta ton sampah yang mengalami proses pengurangan sampah pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 hanya 6,1 juta ton sampah yang melewati proses pengurangan sampah. Dapat disimpulkan bahwa upaya pengurangan sampah dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali dapat dikatakan belum optimal dan tidak seimbang dengan volume sampah yang meningkat, sebesar 5,6 juta ton pada tahun 2019-2020. Selanjutnya pada pengelolaan sampah melalui proses penanganan sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir hanya sekitar 12,9 juta ton sampah yang mengalami proses tersebut pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 hanya 14,3 juta ton yang melewati proses penanganan sampah.

Dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan sampah belum optimal dan tidak seimbang dengan volume sampah yang meningkat sebesar 5,6 juta ton pada tahun 2019-2020.

Memang begitu miris sampah di Indonesia yang seyogyanya dapat dijadikan perhatian utama oleh Pemerintah Indonesia dan perlunya kesadaran masyarakat secara penuh untuk berperan aktif dalam menangani dan mengelola sampah dimulai dari yang terkecil, yaitu sampah rumah tangga. Di sisi lain, Indonesia adalah Negara yang besar dengan jumlah penduduk yang padat, artinya tidak mudah bagi Pemerintah Pusat untuk berdiri sendiri menangani permasalahan sampah dengan sifat sentralistik. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan persoalan sampah di daerahnya masing-masing. Kali ini sasarannya harus lebih terfokus terutama dalam mengelola sampah rumah tangga yang saat ini turut menyumbang timbulan volume sampah di Indonesia dengan persentase terbesar. Bertepatan dengan itu, survei yang dilakukan oleh Katadata *Insight Center* pada tahun 2019 menunjukkan fakta bahwa sebesar 50,8% rumah tangga tidak memilah sampahnya karena tidak ingin repot dan tidak memiliki waktu luang. Padahal, proses pemilahan sampah merupakan sebuah cara yang tepat untuk memudahkan petugas bank sampah dalam memilah sampah yang akan didaur ulang (<https://instagram.com/bebassampahid>, diakses pada 26 Juni 2021 pukul 20.03 WIB).

Permasalahan sampah memang akan selalu banyak kita jumpai di berbagai daerah, seperti halnya Kabupaten Pati yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati turut serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang diimbangi dengan upaya melindungi dan mengelola setiap aset yang dimiliki daerah tersebut, terutama dalam aspek lingkungan hidup seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Kabupaten Pati sebagai Kota Adipura. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan penghargaan Adipura kepada Kabupaten Pati sebagai kota kecil terbersih se-Indonesia pada Hari Senin (14/01/2019) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (<https://patidaily.com/2019/01/pati-raih-penghargaan-adipura-berkategori-kota-bersih>), diakses pada 6 Mei 2021 pukul 15.00 WIB). Siapa sangka, dibalik fakta bahwa Kabupaten Pati yang telah meraih penghargaan Adipura sebagai kota kecil yang turut serta selalu menjaga dan memperhatikan lingkungannya, tetapi dalam penilaiannya hanya terfokus pada lingkungan wilayah kota saja. Fenomena ini dibuktikan bahwa di daerah Kabupaten Pati masih dijumpai kasus berupa permasalahan yang erat kaitannya dengan lingkungan, yakni masalah sampah. Layaknya dua sisi mata uang jika suatu hal terlihat memiliki sisi baik maka sisi buruknya pasti ada dan tidak bisa dihindari. Ketimpangan pengelolaan sampah ini terlihat jelas antara wilayah Kota dan Desa yang ada di Kabupaten Pati. Hal serupa juga dialami kota peraih Adipura lainnya, yakni Kota Depok yang sampahnya terlihat berserakan di jalanan dan hampir seluruh danau atau situ. Bahkan, TPA

Cipayung juga terlihat memprihatinkan karena tidak dikelola dengan optimal ([https://mediaindonesia.com/megapolitan/164416/sampah-menumpuk-di-kota-peraih adipura](https://mediaindonesia.com/megapolitan/164416/sampah-menumpuk-di-kota-peraih-adipura)., diakses pada 6 Mei 2021 pukul 20.37 WIB).

Pada dasarnya, kunci utama dari adanya permasalahan sampah adalah bertambahnya jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya volume sampah sebagai hasil dari sisa-sisa kegiatan masyarakat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sekarsari & Tritanti, (2020:20) dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kota Malang, menyatakan bahwa penduduk Kota Malang bertambah dari waktu ke waktu dengan rata-rata sebesar 1%, belum lagi terdapat jumlah pendatang baru yang melaksanakan studi. Tentunya peningkatan jumlah penduduk ini akan berpengaruh terhadap volume sampah yang meningkat di Kota Malang. Serupa dengan hal ini, bertambahnya jumlah penduduk beberapa tahun terakhir di Kabupaten Pati nyatanya memang memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya volume timbulan sampah. Permasalahan krusial ini akan terus ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Berikut di bawah ini adalah tabel yang menyajikan jumlah pertambahan penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2010-2020.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pati**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2010	1.193.214
2011	1.201.760
2012	1.210.025
2013	1.218.016
2014	1.225.594
2015	1.232.912
2016	1.239.988
2017	1.246.829
2018	1.253.367
2019	1.259.610
2020	1.265.664
Jumlah	13.546.979

Sumber: <https://bps.go.id> (diakses pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 20.04 WIB).

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, menarik kembali bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Pati sesuai dengan tabel di atas maka membuat Pemerintah Kabupaten Pati turut menetapkan sebuah kebijakan untuk dapat menangani persoalan sampah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010. Apalagi, jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Pati yang semakin meningkat, tentunya implementasi dari Peraturan Daerah tersebut harus dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Pati hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, peneliti juga menemukan sebuah fakta menarik bahwa dengan dinobatkannya Kabupaten Pati sebagai Kota Adipura. Namun, masih terdapat salah satu wilayah yang fenomena sampahnya begitu miris,

yakni di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil. Memang terdapat sebuah TPS (Tempat Penampungan Sementara) di Desa Sambilawang yang timbulannya sampah terantau begitu parah sejak beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, keberadaan TPS ini sifatnya bukan permanen dan masih menumpang di bahu jalan bekas rel kereta api.

**Gambar 1. 5 TPS Sambilawang yang Sampahnya Semakin Meluber ke Jalan**



Sumber: Jawa Pos Radar Kudus, 23 November 2020 dan dokumentasi peneliti, Februari 2021.

Kedua gambar 1.5 di atas adalah TPS Sambilawang yang berada di perbatasan pinggir jalan raya dan sawah ini kondisinya terlihat sangat memprihatinkan karena sampah semakin hari semakin meluber ke jalan dan turut mencemari sawah dan sungai di sekitarnya. Ironisnya lagi, memang sudah terdapat dua kotak yang disediakan oleh DPU-TR Kabupaten Pati selaku OPD yang memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Akan tetapi, masih tidak

mencukupi dan ada sampah yang belum terangkut untuk dibawa menuju TPA. Salah satu hal yang masih dipertanyakan adalah keadaan lahan di TPS Sambilawang yang tidak ditandai dengan adanya batas. Dengan demikian, akan semakin membuat banyak warga seenaknya membuang sampah di sana dan mengakibatkan timbulan sampah lebih panjang serta melebar dari tempat yang semestinya sehingga meluber ke jalanan dan mengganggu warga sekitarnya (<https://radarkudus.jawapos.com/read/2020/11/23/226292/tumpukan-sampah-di-pati-meluber-ke-bahu-jalan-jadi-sorotan>., diakses pada 6 Mei 2021 pukul 14.35 WIB). Memang faktor utama dari terbebannya TPS ini karena kebiasaan warga desa yang membuang sampah di TPS tersebut tanpa melakukan upaya untuk mengelola sampah di lingkungannya sendiri, yakni Rumah Tangga. Selanjutnya, upaya DPU-TR selaku OPD yang bertanggung jawab atas pengangkutan sampah diwujudkan dengan memaksimalkan tiga hingga empat kali dalam sehari untuk mengangkut sampah di TPS tersebut. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak bulan Maret tahun ini dan diharapkan kedepannya dapat mengurangi beban volume sampah di TPS tersebut. Bahkan, rencananya TPS tersebut akan dipindahkan ke lahan yang sifatnya permanen tahun depan.

Meninjau kembali pada fenomena yang telah digambarkan oleh peneliti di atas melalui beberapa data dan fakta yang ada. Sudah sepatutnya jika permasalahan sampah di Kabupaten Pati mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah setempat. Sepadan dengan pembahasan ini, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto (2021:3) dengan judul Peran Stakeholders dalam Program Pilah Sampah di

Kelurahan Mangkang Kulon yang menunjukkan bahwa fokus Pemda saat ini harus lebih diarahkan pada pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk upaya mengurangi timbulan sampah agar tidak membebani TPS dan TPA melalui kegiatan pemilahan sampah. Namun, sebelumnya perlu diketahui bahwa terdapat tiga pembagian kewenangan urusan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Pati, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup yang terfokus pada upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terfokus pada penanganan sampah dari TPS ke TPA serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terfokus pada urusan sampah pasar. Adapun Pemerintah Kabupaten Pati juga tengah berupaya untuk mengatasi persoalan sampah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian, membentuk turunan Peraturan Daerah tersebut dengan memberlakukan surat edaran yang berisi (1) perintah Bupati Pati untuk menghimbau setiap Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah, (2) menyediakan sarana pemilahan sampah, (3) membentuk kegiatan pengelolaan skala desa berupa TPS 3R atau Bank Sampah, (4) menghimbau warga untuk berperan aktif dalam menangani sampah, (5) dan membuat Perdes terkait pengelolaan sampah yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 7 tahun 2010 (Surat Edaran No. 658.1 / 4559 tentang Pengelolaan Sampah. Pati, 11 Oktober 2017).

Apalagi, sehubungan dengan adanya fenomena yang terjadi pada TPS di Desa Sambilawang yang terbebani volume sampahnya, desa tersebut kini tengah

berupaya untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah dengan menjalankan Program Bank Sampah sebagai program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia. Tentu saja Program Bank Sampah “Semut Ijo” perlu direalisasikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa setempat sebagai upaya pengelolaan sampah di tingkat terkecil. Di sisi lain, bank sampah sendiri merupakan sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang di dalamnya memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengelola lingkungan sekitar dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Adapun Wijayanti dan Suryani (1015:174) menjelaskan program bank sampah dapat dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam mengelola sampah, salah satunya dengan upaya penukaran dan menabung sampah. Bukan hanya itu saja, agar pengelolaan bank sampah dapat berjalan dengan optimal, hal tersebut juga tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang mengelola dan fasilitas yang memadai serta perlunya kegiatan pembinaan, seperti sosialisasi atau *workshop* sebagai langkah awal untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat desa setempat agar ikut serta mendukung pembentukan bank sampah dan berpartisipasi penuh, setidaknya masyarakat harus lebih siap dan tanggap dalam mengatasi permasalahan sampah serta memahami tata cara pemilahan dan penyetoran sampah ke bank sampah (Syafudin et al., 2019: 142).

Upaya untuk mendukung implementasi program bank sampah juga dapat diwujudkan melalui pembentukan kelompok sebagai wadah agar masyarakat lebih terampil dan berpartisipasi aktif (Saputro et al., 2015:87). Pembentukan sebuah

kelompok yang aktif memang sangat penting bagi sebuah implementasi program bank sampah agar dapat berkembang dari segi kualitas. Sementara itu, keberadaan bank sampah juga dapat mendatangkan banyak sekali keuntungan, menurut Syafrudin (dalam Wijayanti & Suryani, 2015:141) sampah yang diolah dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dijadikan bahan baku komoditas maupun diperdagangkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satunya adalah Kota Surabaya yang kini dinilai sebagai Kota yang berhasil mengelola sampah dibandingkan dengan Kota Jakarta. Bank Sampah Induk Surabaya (BSIS) tengah mengajak seluruh masyarakat Surabaya untuk mulai mengelola dan memilah sampah agar menjadi berkah berupa nilai ekonomi. Di samping itu, fokus utama Bank Sampah Induk Surabaya adalah melakukan pendampingan dan memberikan pengarahan kepada setiap warga (<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/manfaatkan-bank-sampah-induk-surabaya-bisa-dapat-uang-sampah-berkurang-1v9IHxXWFYJ> diakses pada 6 Mei 2021 pukul 19.37 WIB).

Sesuai dengan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Kabupaten Pati, tentu dalam hal ini upaya pengelolaan sampah berada di bawah naungannya, termasuk dalam implementasi program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang sebagai buah dari suatu kebijakan. Apalagi, keberadaan bank sampah tentu mendukung upaya pengelolaan sampah bagi Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat (Utari, 2019:2). Dinas Lingkungan

Hidup memiliki peran dalam implementasi kebijakan di bidang lingkungan seperti pengelolaan sampah di Kabupaten Pati. Adapun penelitian yang dilakukan Ariyanto (2021:12) menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran untuk memfasilitasi program, melakukan sosialisasi, pelatihan maupun *workshop* mengenai pengelolaan sampah serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi dalam bidang pengelolaan sampah. Di samping itu, kepedulian lingkungan memang dibutuhkan kesadaran secara kolektif oleh warga Kabupaten Pati serta Pemerintah perlu memberi sosialisasi secara masif dan berkesinambungan upaya mengelola sampah sampai ke desa-desa dan juga dapat diberitahukan melalui konten kreatif (<https://www.murianews.com/2019/06/20/166563/pati-darurat-sampah>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 14.35 WIB).

Persoalan sampah perlu ditangani dengan baik agar tidak membebani TPS yang berada di kawasan desa tersebut. Perlunya edukasi untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga dengan penerapan 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) melalui program bank sampah yang sejatinya sebagai salah satu kegiatan bersifat sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah dan bijak pada upaya pengelolaan sampah (Putra, 2020: 2). Dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah sangat diperlukan karena dinas tersebut berkewajiban untuk melaksanakan setiap urusan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah (Djani, 2019: 58). Oleh karena itu, peran dari Dinas Lingkungan Hidup diperlukan dalam implementasi program bank sampah di Desa Sambilawang agar keberadaannya dapat berkembang lebih baik

mulai dari segi sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran. Selain itu, dapat mendorong Pemerintah Desa untuk meningkatkan partisipasi warga desa dan memberikan kebermanfaatan dalam kehidupan desa. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menguraikan permasalahan serta menarik kesimpulan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi program bank sampah di desa tersebut sehingga peneliti ingin mengangkat judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Implementasi Program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dari peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dari peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian harus dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis, pembaca, dan generasi di masa depan, baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian di atas diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengelolaan sampah melalui program bank sampah.

##### **1.4.2 Secara Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam Ilmu Administrasi Publik.
- b. Penelitian ini dapat menjadi tambahan kekayaan dan keluasaan keilmuan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dalam program studi Administrasi Publik.

- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peran aktor khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan Masyarakat umum dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kabupaten Pati.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil beberapa pedoman pada sejumlah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Seperti penelitian dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam Pengelolaan Sampah Organik” yang dilakukan oleh Erlinda Puspitasari dan Gunawi pada tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik. Upaya untuk mengatasi volume sampah yang semakin meningkat di Kota Probolinggo membuat pemerintah membentuk OPD Pengolahan Sampah dan Limbah di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani proses sampah menjadi kompos. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini meliputi pengelolaan sampah rumah tangga dan kegiatan daur ulang serta melakukan pembinaan seperti sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum terdapat sanksi yang jelas dan tegas untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Penelitian ini hampir sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Hanya saja berbeda tahun dan lokus penelitian serta fenomena yang

diangkat lebih terfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi Program Bank Sampah.

Penelitian mengenai persoalan sampah yang lain yang dilakukan oleh Armi pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pengelolaan Sampah Masyarakat terhadap Perilaku Membuang Sampah Ke Sungai di Desa Mideun Geudong Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh sebelum dan sesudah diberikan sosialisasi yang nantinya akan berdampak pada perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang sudah diberikan sosialisasi mengenai sampah cenderung memiliki perilaku kesadaran lebih tinggi daripada responden yang belum diberikan sosialisasi. Melihat hal ini, jika disesuaikan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti tentunya perlu adanya peran penting dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah. Kesadaran akan partisipasi aktif warga dalam keikutsertaan Program Bank Sampah menjadi kunci untuk mengurangi sampah yang ada di rumah tangga.

Pada tahun 2021 terdapat penelitian dengan judul “Analisis Peran Stakeholders dalam Program Pilah Sampah di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang” yang diteliti oleh Ervin Dwi. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran *stakeholders* dalam Program Pilah Sampah serta faktor pendorong dan penghambat program tersebut.

Penelitian ini didasarkan atas keingintahuan peneliti terhadap pengelolaan sampah yang belum optimal di daerah Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran Pemkot dan Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai *policy creator* dan fasilitator. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berperan menjadi koordinator. Kemudian, untuk Kecamatan dan Kelurahan sebagai koordinator. Di sini Bank Sampah berperan sebagai implementor dan koordinator. Sementara KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) berperan sebagai implementor, akselerator dan koordinator. Terakhir, masyarakat sebagai implementor. Hasil dari penelitian ini ditemukan beberapa faktor penghambat seperti miss komunikasi, *stakeholder* terlalu ‘*money oriented*’, minim apresiasi, budaya membuang sampah sembarangan, partisipasi rendah, minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penelitian ini mengangkat kasus yang sama dengan penelitian yang penulis ambil, yakni mengenai permasalahan sampah dan upaya pilah sampah melalui sebuah program. Namun, peneliti hanya memfokuskan pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi Program Bank Sampah.

Penelitian yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru dengan judul “Peran Pemerintah sebagai Regulator dan Penyedia Layanan dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” ini diteliti oleh Julifar dan Sukendi (2020) bahwa permasalahan sampah di Kota Pekanbaru belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kebijakan untuk mengatasi persoalan sampah di Kota

Pekanbaru sudah berjalan, tetapi masih banyak warga yang belum memahami keberadaan dari adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 20 responden. Peran pemerintah sebagai penyedia layanan sudah cukup berperan, sedangkan peran sebagai regulator dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih kurang optimal maka dari itu, untuk mengoptimalkan peran pemerintah perlu dilaksanakan beberapa hal seperti sosialisasi terkait peraturan persampahan yang ada. Penelitian ini hampir sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Hanya saja berbeda pada tahun dan lokus penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Muchsin & Saliro (2020) dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah” meneliti tentang peran Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam pengelolaan sampah, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan peran Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara kepada pihak yang bersangkutan seperti Pemerintah Desa Sepuk Tanjung, dan masyarakat desa. Penelitian ini difokuskan pada lingkup desa karena sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah menunjukkan bahwa pengelolaan sampah perlu untuk melibatkan seluruh lapisan dari pemerintah dan masyarakat sampai pada lingkup desa. Di sisi lain, masih banyaknya warga Desa Sepuk Tanjung yang membuang sampah ke sungai serta

minimnya sampah yang diangkut petugas menjadi bahan pertimbangan mengapa peneliti mengangkat judul ini. Penelitian ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu mengenai persoalan sampah. Hanya saja berbeda lokus, tahun, serta peran yang diteliti.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan sampah di Kota Makassar pada tahun (2018) yang pernah dilakukan oleh Kasmita ditujukan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan sampah di Kota Makassar serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari George Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data bersumber dari wawancara dan observasi dari lapangan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum maksimal karena masih kekurangan sumber daya dalam pengangkutan sampah, serta struktur yang ada belum mampu mengatasi permasalahan sampah di Kota Makassar. Melihat hal ini, jika disesuaikan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti tentunya hampir memiliki kesamaan, yaitu pada kebijakan pengelolaan sampah. Hanya saja yang membedakan ada pada Program Bank Sampah, lokus dan tahun penelitian.

Penelitian dengan lokus di wilayah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan ini dilakukan oleh Magriaty, dkk (2020) meneliti tentang dampak kebijakan Pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui

observasi dan survei lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Melihat hal ini, terdapat tiga kunci utama dalam menganalisis kebijakan pengelolaan sampah, yaitu Perda Nomor 6 tahun 2015, yakni (1) prinsip, tujuan, penanganan dan pengawasan sampah di Kabupaten Tapin; (2) keterlibatan pihak pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan; (3) kerjasama antar daerah atau kemitraan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya pengurangan sampah dengan memberikan dukungan fasilitas berupa TPS3R dan bank sampah untuk mengurangi sampah organik dan anorganik masih diperlukan. Selain itu, masih terdapat Keterbatasan daya dukung sosial dan kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Bank Sampah yang menerapkan prinsip 3R (*reduce, recycle, reuse*) memang menjadi salah satu kunci penting guna mengurangi timbulan sampah. Hal ini sesuai dengan persoalan yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai keberadaan Program Bank Sampah di Desa Sambilawang. Hanya saja lokus dan tahun yang berbeda.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rully Setiawan (2020) tentang Faktor yang menentukan penerimaan masyarakat tentang pemilahan sampah. Penelitian yang dilaksanakan di wilayah Surabaya ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode pengambilan sampel dan struktur serta data kuesioner. Penelitian ini diangkat oleh Rully Setiawan atas alasan utama bahwa

sampah merupakan persoalan yang akan terus hadir dan kegiatan pilah sampah yang belum menjadi suatu praktek yang populer di kalangan rumah tangga. Penelitian ini ditujukan untuk mengupas secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat tentang penyortiran atau pemilahan sampah. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat tiga faktor mengapa praktek pilah sampah masih jarang digunakan oleh rumah tangga, di antaranya kurangnya fasilitas pemilahan, tidak ada waktu atau tidak sempat, lebih memilih dicampur. Penelitian ini hampir sama dengan persoalan yang peneliti angkat, yaitu mengenai kegiatan pilah sampah melalui Program Bank Sampah, hanya saja penelitian ini lebih difokuskan pada faktor-faktor yang menentukan penerimaan masyarakat dalam kegiatan memilah sampah.

Adapun penelitian dengan judul "*The Importance Knowledge to Encourage Household Waste-Sorting Behaviour in Indonesia*" dilakukan oleh Zakianis, dkk (2017) ini ditujukan untuk mengetahui tentang Pengetahuan dan Perilaku pemilahan sampah di tingkat rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain *cross-sectional* dan data sekunder dari Survei Perilaku Peduli Lingkungan 2013 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini mengungkap bahwa penanganan sampah rumah tangga di Indonesia sangat tidak optimal. Lebih dari 50% rumah tangga lebih memilih untuk membakar sampah. Responden yang sudah memahami ilmu bahwa membakar sampah dapat mencemari udara. Namun, hanya sedikit rumah tangga yang lebih memilih untuk memilah sampah mereka.

Pengetahuan tentang pengelolaan sampah merupakan kunci penting yang dapat mempengaruhi rumah tangga dalam melakukan kegiatan pilah sampah. Melihat hal ini, jika disesuaikan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti tentunya hampir memiliki kesamaan, yaitu pada upaya pengelolaan sampah melalui kegiatan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Hanya saja, penelitian ini lebih terfokus pada pentingnya pengetahuan untuk mendorong rumah tangga dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kholil, dkk (2018) ini mengangkat sebuah persoalan pengelolaan sampah berbasis 3R di Bank Sampah Mutiara yang terletak di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berdirinya Bank Sampah Mutiara sebagai wujud nyata dari masyarakat yang peduli lingkungan. Keterlibatan mereka sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan sampah di daerah mereka, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan 3R di Bank Sampah Mutiara Kota Bekasi telah berjalan dengan baik. Proses rangkaian pemilahan bank sampah berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini sama dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai program Bank Sampah. Hanya saja, penelitian ini tidak mengkaji tentang keterlibatan peran pemerintah dalam implementasi Program Bank Sampah Mutiara yang terdapat di Kota Bekasi.

Selain itu, peran aktif masyarakat membuktikan bahwa Bank Sampah Mutiara sudah memberikan banyak manfaat bagi mereka dan lingkungan sekitarnya.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Menurut Revida (2020:1) sudah seyogyanya setiap manusia tidak akan pernah luput dari proses administrasi publik. Istilah administrasi publik yang kita ketahui mengandung makna yang lebih luas bukan hanya ditujukan untuk melayani negara, akan tetapi ditujukan untuk melayani masyarakat dan melibatkan pihak swasta. Administrasi Publik menurut Gerald Caiden (dalam Priambodo & Rostyaningsih, 2019:5) mendefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan setiap urusan penyelenggaraan umum atau publik serta memenuhi kebutuhan publik, sedangkan menurut Barton dan Chapper (dalam Keban, 2014:5) mengatakan jika administrasi publik merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam melibatkan sumber daya untuk memberikan pelayanan. Istilah administrasi publik menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai agen tunggal atau regulator yang akan selalu berinisiatif dalam mengatur masyarakat karena masyarakat adalah pihak yang pasif (Keban, 2014:4). Sementara itu, publik mengandung arti umum, orang banyak, negara, maupun masyarakat. Pengertian Publik ditinjau dari segi struktural dan fungsional adalah lembaga yang berhubungan erat dengan identitas suatu golongan yang memiliki suatu kesatuan (Anggara, 2012:125).

Berdasarkan pemaparan teori di atas, dapat ditarik kesimpulan jika administrasi publik merupakan sebuah proses dan kegiatan pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan melibatkan sumber daya yang ada dan mumpuni di bidangnya. Oleh karena itu, persoalan sampah yang kini menjadi bagian dari isu publik, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Dengan kata lain, pemerintah menyediakan setiap pelayanan publik sebagai upaya untuk mengedepankan pengelolaan sampah, mulai dari anggaran, sumber daya, fasilitas, pembinaan, dan pengawasan. Hal ini harus diprioritaskan agar komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam mengatasi persoalan sampah dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan setiap lapisan masyarakat yang akan selalu terikat dengan urusan administrasi publik dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai warga negara yang sah untuk menerima pelayanan publik yang optimal dari pemerintah setempat.

### **1.5.3 Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (dalam Anggara, 2012:499) berpendapat bahwa secara etimologis, kebijakan berasal dari bahasa Sanskerta, Latin dan Yunani, yang mana *polis* (negara-kota) yang dikembangkan menjadi Negara atau *politia*, dalam bahasa Inggris menjadi *policie* yang artinya masalah publik, sedangkan menurut Lemay (dalam Keban, 2014: 60) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk keputusan yang dikembangkan oleh pemerintah atau orang-orang yang ada dalam pemerintahan. Jika ditelusuri, terdapat empat bentuk kebijakan publik yang dibedakan atas (1) bentuk *regulatory* atau mengatur perilaku masyarakat, (2) bentuk *constituent*, yaitu bertujuan untuk

melindungi sebuah *state* atau Negara, (3) bentuk *redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali sumber daya yang ada, (4) bentuk *distributive* dengan memberikan akses yang sama kepada sumber daya yang ada (Keban, 2014:61).

Thomas R. Dye (dalam Arifin, 2017:13) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintahan, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakannya bahkan mendiamkan hal itu. Menurutnya, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada sebuah tujuan yang akan dicapai, serta kebijakan tersebut harus dapat terlaksana dengan baik untuk mengatasi permasalahan publik, bukan hanya keinginan pejabat pemerintah semata. Sebaliknya, jika pemerintah tidak melakukan apapun, hal itu juga dapat disebut sebagai kebijakan negara, sebab sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan memberikan dampak yang sepadan dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Melihat beberapa konsep di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan publik ditujukan untuk mencapai kesejahteraan warga Negara melalui peraturan yang dibuat oleh Pemerintah terutama dalam menangani sebuah permasalahan maupun persoalan publik. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pemerintah Kabupaten Pati membentuk sebuah regulasi terkait pengelolaan sampah sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Pati.

#### **1.5.4 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan menurut Wahab (dalam Anggara, 2012:531) menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses keputusan kebijakan yang terbentuk dalam sebuah peraturan, keputusan, perintah atau dekrit. Menurut Solichin (dalam Anggara, 2012:534) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sebagai penjabaran keputusan politik. Namun, mengangkut masalah konflik dan keputusan untuk memperoleh apa dalam adanya sebuah kebijakan. Selanjutnya, proses implementasi akan selalu diawali dari lahirnya sebuah kebijakan maupun peraturan, dan setiap kebijakan yang telah disepakati bersama tentu memiliki sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Dalam sebuah implementasi kebijakan tentu tidak terlepas dari keterlibatan aktor-aktor. Suatu proses implementasi kebijakan akan selalu dipengaruhi oleh faktor penting yang tidak lain adalah aktor kebijakan itu sendiri. Aktor kebijakan memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah implementasi kebijakan. Oleh karena itu, tanpa adanya aktor kebijakan yang berkompeten dan kredibel sesuai dengan fungsinya maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya serta tujuan yang telah ditentukan tidak dapat dicapai dengan optimal. Sehubungan dengan ini, aktor implementasi dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam sebuah proses kebijakan publik sesuai dengan penerapan *good governance* menurut Serdamayanti (dalam Priambodo & Rostyaningsih, 2019:33), yaitu:

### 1. Negara atau Pemerintah

Lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di dalamnya melalui kebijakan publik yang dibuatnya.

### 2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta yang memiliki peran aktif dalam proses interaksi sistem pasar dan yang lainnya.

### 3. Masyarakat Madani

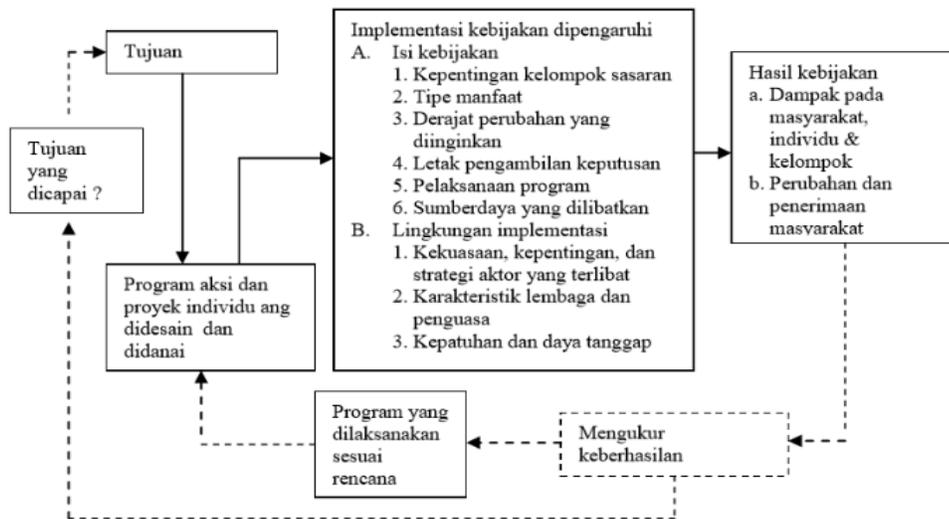
Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang berada di tengah-tengah pemerintah dan perseorangan yang berinteraksi secara sosial, ekonomi maupun politik.

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait aktor dalam implementasi kebijakan, berikut terdapat teori yang di dalamnya membahas keterlibatan aktor dalam proses kebijakan publik, salah satunya adalah teori dari Merilee S. Grindle (dalam Priambodo & Rostyaningsih, 2019:34) yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel tersebut mencakup seberapa jauh keinginan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, ketepatan letak program, aktor yang terlibat apakah sudah terperinci. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk menerapkan

hasil dari keputusan yang telah dibentuk oleh seorang atau kelompok yang di dalamnya terdapat perilaku dan interaksi dari aktor-aktor implementasi dalam rangka mencapai keberhasilan sebagai upaya menangani masalah publik. Dengan demikian, penelitian terkait dengan implementasi program bank sampah merupakan upaya pemerintah Kabupaten Pati dalam menerapkan hasil keputusan yang telah dibentuk atas interaksi dari beberapa aktor yang bertujuan untuk mengentaskan masalah publik, yakni persoalan sampah.

### 1.5.5 Model Implementasi Kebijakan

**Gambar 1. 6 Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle**



Sumber: Rihandoyo (<http://eprints.undip.ac.id/5204/1/.pdf>., diakses 26 Mei 2021 pukul 14.00 WIB).

Dalam sebuah implementasi kebijakan, terdapat beberapa model implementasi kebijakan, salah satunya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Teori ini menyebutkan bahwa di dalam implementasi sebuah kebijakan terdapat indikator konten dan konteks. Ciri khas

dari model implementasi Grindle adalah pemahamannya yang komprehensif pada sebuah kebijakan, terutama permasalahan yang berkaitan dengan implementator (dalam Juliana & Priyadi, 2021: 24). Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan ditentukan oleh *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi (konten) dari kebijakan tersebut adalah:

1. Kedudukan pembuat kebijakan;
2. Jenis manfaat yang dihasilkan;
3. Sumber daya yang dikerahkan;
4. Derajat perubahan yang diinginkan;
5. Siapa pelaksana program;
6. Sumber daya yang dilibatkan.

Selain itu, konteks implementasinya adalah:

1. Karakteristik lembaga dan penguasa;
2. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Seperti penjelasan di atas bahwa sebuah implementasi kebijakan tentunya melibatkan peran penting pemerintah di dalamnya. Terkait dengan hal ini, peneliti memiliki keinginan untuk mendalami penelitian ini dengan menggunakan model implementasi dari Merilee S. Grindle untuk mendalami salah satu peran aktor yang terlibat dalam implementasi program bank sampah, yakni Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Pati dengan melihat pada konteks kebijakan publik yang

dikemukakan oleh Grindle. Dalam hal ini, Grindle menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Peneliti ingin memfokuskan penelitian ini dari segi lingkungan implementasi (konteks) sebuah kebijakan, berikut penjelasannya:

#### 1. Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa sudah dipastikan memiliki keterlibatan dengan setiap fungsi, tugas, tujuan dan kedudukan dari lembaga tersebut. Hal ini penting untuk dipahami karena lembaga atau aktor yang berkaitan turut ambil bagian dalam pemecahan konflik di dalam proses pengambilan sebuah keputusan yang nantinya akan berdampak pada implementasi kebijakan. Terlebih lagi, dalam upaya Pemerintah Kabupaten Pati untuk dapat mengatasi persoalan sampah melalui program bank sampah “Semut Ijo” di Desa Sambilawang. Melalui program tersebut, diharapkan masyarakat dapat turut serta mengelola sampah di tingkat terkecil melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Untuk lebih mendalami karakteristik lembaga dan penguasa, peneliti menggunakan karakteristik *stakeholders* yang tercantum dalam “Modul Pelatihan Analisis Kebijakan Edisi Revisi” karangan Erna Irawati (dalam Priambodo & Rostyaningsih, 2019:39). Berikut terdapat lima poin yang peneliti gunakan untuk mendalami karakteristik Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan perannya:

##### a. Jenis Lembaga

Pada poin ini, jenis lembaga digunakan untuk melihat latar belakang organisasi yang turut ambil bagian dalam sebuah pelaksanaan implementasi kebijakan. Lembaga yang terlibat dapat bersumber dari pemerintahan (*Government*) maupun dari luar pemerintahan (*Outside Governments Actors*). Di sini, peneliti mencoba melihat terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati sebagai aktor yang terlibat dalam implementasi program bank sampah “Semut Ijo” dapat dikategorikan sebagai lembaga internal atau eksternal pemerintahan.

b. Pengetahuan terhadap kebijakan

Pada poin ini, pengetahuan terhadap kebijakan penting sebagai dasar sebuah organisasi atau aktor yang terlibat dalam berkontribusi untuk menjalankan sebuah kebijakan. Pengetahuan organisasi atau aktor terhadap sebuah kebijakan itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua, yakni mendukung atau tidak mendukung. Oleh karena itu, jika semakin baik pengetahuan organisasi atau aktor terhadap sebuah kebijakan maka semakin baik pula kemungkinan implementasi kebijakan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Di sini, peneliti mencoba mendalami bagaimana bentuk pengetahuan Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor yang terlibat dalam implementasi program bank sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang.

c. Posisi aktor terhadap sebuah kebijakan

Perlu bagi peneliti untuk mengetahui posisi organisasi atau aktor yang terlibat dalam berkontribusi untuk menjalankan sebuah kebijakan termasuk dalam pelaksanaan sebuah kegiatan maupun program yang ada. Terkait dengan hal ini, terdapat dua pembagian kedudukan aktor dalam sebuah kebijakan, yakni mendukung dan menentang. Perlu untuk melihat bagaimana posisi dan kedudukan DLH dalam membawahi urusan pengelolaan sampah di Kabupaten Pati, terutama berkaitan dengan implementasi program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang.

d. Sumber daya yang dimiliki

Pada poin ini, terdapat beberapa bentuk sumber daya yang dimiliki organisasi atau aktor untuk mendukung setiap pelaksanaan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) sebagai aktor dalam implementasi kebijakan. Di sini, peneliti mencoba mengetahui bentuk dukungan sumber daya apa saja yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor yang terlibat dalam implementasi program bank sampah “Semut Ijo” di Desa Sambilawang. Apalagi, dukungan sumber daya seperti SDM, anggaran dan sarpras memang sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dari implementasi program bank sampah Semut Ijo.

e. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah poin utama dalam sebuah organisasi. Tipe kepemimpinan sangat beragam mulai dari tipe kepemimpinan demokratis, paternalistik, karismatik dan yang lainnya. Oleh karena itu, berhasil atau

tidaknya keberjalanan sebuah organisasi ditentukan oleh tipe kepemimpinan yang digunakan dalam sebuah organisasi. Perlu untuk Dinas Lingkungan Hidup menyelaraskan visi dan misi yang telah ditentukan bersama. Setiap saran dan masukan dari aktor lain dan pegawai DLH dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya pemecahan suatu konflik, apalagi terkait dengan persoalan sampah.

## 2. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

Sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kepentingan, kekuasaan dan strategi yang digunakan oleh setiap aktor yang terlibat dan turut ambil bagian dalam pemecahan suatu permasalahan publik (Trisnanti, 2013:4). Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh aktor tersebut mengupayakan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Apalagi, dengan melihat keberadaan institusi yang berkuasa dari lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut terlaksana juga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilannya. Melihat hal ini, DLH tentu mengupayakan setiap kekuasaan yang dimiliki untuk dapat mengupayakan keberhasilan sebuah implementasi program bank sampah. Bukan hanya itu saja, DLH juga dianggap memiliki kepentingan dalam setiap urusan di bidang lingkungan hidup.

## 3. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Suatu hal yang dianggap sangat menentukan dalam sebuah proses implementasi kebijakan adalah bentuk kepatuhan dan daya tanggap atau respon dari para pelaksana. Dengan demikian, agar tujuan program dapat

terwujud maka para implementator perlu merespon dengan cepat setiap kebutuhan. Dengan demikian, peneliti ingin melihat seberapa jauh bentuk kepatuhan dan daya tanggap dari Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang.

### **1.5.6 Peran Aktor**

Menurut Sarwono (dalam Hutami & Chariri, 2011:5) menjelaskan bahwa teori peran atau yang biasa disebut *Role Theory* merupakan bentuk sebuah sifat yang ditekankan dalam sebuah teori peran untuk dapat mempelajari perilaku individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya sebagai pelaku sosial di sebuah lingkungan. Peran merupakan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang yang memiliki sebuah kedudukan. Oleh karena itu, seseorang diharapkan berperilaku secara tertentu dalam menjalankan posisi atau kedudukannya dalam sebuah organisasi. Mengetahui peran dari aktor yang terlibat maka Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020:7) menjelaskan bahwa peran aktor dibagi dalam beberapa jenis, antara lain:

1. *Policy Creator*, yakni aktor yang memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan dan penentu sebuah kebijakan.
2. Koordinator, yakni aktor yang berperan dalam mengkoordinasikan program kepada aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan atau program.
3. Fasilitator, yakni aktor yang berperan dalam memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan oleh aktor lain atau kelompok sasaran dalam implementasi sebuah kebijakan atau program.

4. Implementator, yakni aktor sebagai pelaksana sebuah kebijakan atau program yang telah ditentukan kepada kelompok sasaran yang dituju.
5. Akselerator, yakni aktor yang berperan untuk memberikan kontribusi dan mendukung pelaksanaan suatu kebijakan atau program agar berjalan dengan baik sesuai target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa peran adalah bagian dari perilaku manusia yang harus dilakukan dalam kehidupan sebagai bentuk interaksi antara individu maupun kelompok. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian terkait implementasi program bank sampah melibatkan peran aktor dari pemerintah, yakni Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi program Bank Sampah di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

#### **1.5.7 Pengelolaan Sampah**

Sampah adalah sisa dari kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah yang dihasilkan, sedangkan penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah (Ekarishanti & Krismartini, 2019:6). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Bachtiar et al. (2015:129) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulan sampah, yaitu:

1. Jumlah penduduk yang meningkat berbanding lurus dengan sampah yang dihasilkan juga akan meningkat;

2. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang tinggi akan menambah jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat;
3. Kemajuan teknologi juga merupakan faktor penyebab timbulan sampah karena bahan baku yang digunakan juga beragam.

Menurut Sa'id Gumbira (dalam Bachtiar et al., 2015:129) ketiga faktor di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sampah akan menjadi permasalahan yang tidak akan ada ujungnya dan tidak akan pernah ada putus-putusnya. Sampah yang tidak dikelola dengan optimal dapat menyumbang pengaruh yang tidak baik bagi lingkungan dan menjadi sarang penyakit. Terdapat tiga jenis sampah menurut Daniel (dalam Juniartini, 2020:30), yaitu:

1. Sampah organik atau sampah basah, yaitu sampah yang terdiri dari bahan yang mudah terurai secara alami seperti, makanan, dedaunan.
2. Sampah anorganik atau sampah kering, yaitu sampah yang sulit terurai secara biologis selain itu proses penghancurannya membutuhkan waktu yang lama dan penanganan khusus seperti kaca, plastik, *Styrofoam*.
3. Sampah bahan berbahaya atau beracun (B3) adalah sampah yang terdiri dari bahan berbahaya beracun seperti limbah pabrik, limbah rumah sakit, dan yang lainnya.

Menurut Damanhuri Tri (dalam Wahyudi et al., 2020:1025). Terdapat aspek penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah, yaitu:

1. Peraturan (hukum) atau kebijakan;

2. Lembaga atau Organisasi;
3. Finansial;
4. Lingkungan Hidup;
5. Teknik Operasional;
6. Sosial.

Secara umum penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sejenis Sampah rumah Tangga dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengurangan sampah meliputi pengurangan timbulan sampah, penggunaan ulang sampah dan mendaur ulang sampah.
2. Penanganan sampah meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya untuk mengatasi sampah agar turut mengurangi volume timbulan sampah yang berada di TPS maupun TPA. Pengelolaan sampah sebaiknya menggunakan sistem terbaru, yakni dengan pendekatan pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan.

### **1.5.8 Bank Sampah**

Aktivitas mengurangi dan menangani sampah terkait erat dengan konsep 3R yang terdiri atas *Reduce* (mengurangi timbulan sampah), *Reuse* (menggunakan kembali bahan yang berpotensi menimbulkan sampah), *Recycle* (mendaur ulang sampah). Di Indonesia, bank sampah hadir pertama kali di Bantul, Yogyakarta

pada tahun 2008. Hingga sekarang ini, bank sampah sudah mulai hadir di setiap kota yang ada di Indonesia, di antaranya Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan Gresik. Pada umumnya, bank sampah beroperasi seperti sebuah bank dengan sistem penukaran dan setoran dalam bentuk deposit tabungan yang mana masyarakatnya dalam berperan aktif untuk memilah dan mengumpulkan sampah rumah tangga mereka yang ditabung ke Bank Sampah selanjutnya didaur ulang atau dimanfaatkan kembali guna mengurangi volume sampah. Menurut Friedberg dan Hilderbrand (dalam Syafrudin et al., 2019:141) menjelaskan bahwa biasanya Bank Sampah hanya menerima limbah padat rumah tangga untuk diolah. Namun, beberapa dari Bank Sampah juga menerima limbah padat organik atau limbah padat makanan untuk diolah menjadi pupuk cair maupun kompos. Konsep bank sampah menurut peneliti adalah kegiatan yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama peran aktif masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan dari berbagai macam permasalahan sampah. Melalui keberadaan bank sampah tentunya memberikan banyak manfaat terutama dalam mengubah sampah yang dipandang sebelah mata menjadi barang yang bernilai guna dan bernilai ekonomis.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik yang akan selalu berkaitan pada setiap hal yang telah diputuskan oleh pemerintah dengan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal ini, setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah akan terlihat manfaatnya apabila telah

dilakukan pada tahap implementasi terhadap kebijakan tersebut. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mengatasi setiap permasalahan publik, kebijakan terdiri atas beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan atas koordinasi pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Sesuai dengan alat penelitian dan teori yang digunakan maka fenomena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah dengan melihat peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tanggung jawab besar untuk melaksanakan setiap urusan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah. Adapun peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang terdiri dari konten dan konteks. Terkait dengan “konten”, yakni berusaha memahami isi dari program yang dilaksanakan, sedangkan “konteks”, yakni terkait dengan kondisi lingkungan luar yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mencoba untuk mengkaji dan memahami secara mendalam dari segi konteks kebijakan yang pada dasarnya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan sebuah implementasi program bank sampah melalui peran aktor, yakni Dinas Lingkungan Hidup yang membawahi urusan pengurangan sampah berbasis masyarakat pada implementasi program Bank Sampah Semut Ijo di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Adapun konteks kebijakan tersebut, yakni:

1. Karakteristik lembaga dan penguasa

- a. Jenis lembaga;
  - b. Pengetahuan aktor terhadap kebijakan;
  - c. Posisi aktor terhadap kebijakan;
  - d. Sumber daya yang dimiliki;
  - e. Tipe kepemimpinan yang dianut.
2. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat ditinjau dari:
    - a. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki aktor;
    - b. Kepentingan yang dibawa oleh aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan;
    - c. Strategi yang dimiliki oleh aktor kebijakan.
  3. Kepatuhan dan daya tanggap aktor.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Anggito, 2018:7) menjelaskan bahwa penelitian (*research*) dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh pemahaman baru yang lebih kompleks. Jenis penelitian ilmiah dalam penelitian ini, yakni penelitian kualitatif yang secara umum digunakan atas sebuah investigasi mencari jawaban atas pertanyaan, mengumpulkan bukti, menghasilkan temuan yang belum ditentukan serta dapat membantu peneliti menafsirkan fenomena dan memahami masalah penelitian yang ada dari situasi tertentu di masyarakat (Mack, dkk, 2005:7). Selain itu, menurut Marshal dan Rosman (dalam Gabrielian 1999:4) penelitian kualitatif tidak membatasi

beberapa disiplin ilmu tertentu, dan digunakan untuk cakupan luas berbagai bidang ilmu, di antaranya seperti sosiologi, pendidikan, antropologi, kajian seni, sejarah, budaya, biografi, kesehatan, psikologi, kesusastraan, psikiatris dan yang lainnya. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena fenomena yang akan diteliti mengenai permasalahan sampah di Kabupaten Pati khususnya di Desa Sambilawang dalam implementasi Program Bank Sampah sebagai program nasional sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengamanatkan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) cukup kompleks, dinamis dan banyak gejala yang ditemukan sehingga data yang diperoleh dari para narasumber tersebut perlu dijaring dengan metode yang lebih alamiah seperti melalui *interview*. Bertepatan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran yang penting dalam implementasi program Bank Sampah di Desa Sambilawang. Adapun penelitian ini berupaya untuk menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk memahami potret secara mendalam sesuai mengenai peran DLH dalam implementasi program Bank Sampah dengan pendeskripsian secara rinci.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Menurut Suwarna Al Muchtar (dalam Nurgiansah, 2018:64) menyatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan mendapatkan beberapa informasi terkait suatu fenomena berdasarkan data yang akan diperlukan. Lokasi yang dipilih harus melewati beberapa pertimbangan atas kesesuaian topik yang dipilih untuk diteliti. Sehubungan dengan itu, peneliti

mengambil lokus di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Lokus ini digunakan oleh peneliti karena belum terdapat penelitian yang mengkaji tentang permasalahan sampah di Desa tersebut. Selain itu, melalui beberapa pertimbangan atas keingintahuan peneliti tentang Program Bank Sampah sebagai salah satu program yang dicanangkan pemerintah guna mengatasi sampah dari sumbernya di tingkat rumah tangga menjadikan alasan peneliti mengambil lokus penelitian di Desa Sambilawang. Peneliti menemukan fakta bahwa masih jarang sekali ditemukan penelitian yang menyoroti permasalahan sampah di Kabupaten Pati serta terdapat fenomena yang mengungkapkan belum maksimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi Program Bank Sampah di Desa Sambilawang sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau informan adalah sumber yang dibutuhkan dalam suatu penelitian untuk memberikan informasi akurat (Nurgiansah, 2018:63). Subyek penelitian inilah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sumber informasi mengenai situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu strategi pengambilan sampel yang digunakan dengan mengelompokkan kriteria yang relevan dengan pertanyaan yang akan diajukan dalam sebuah penelitian (Mack, 2005:5). Teknik pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh kunci informan yang berkompeten dan ahli di

bidangnya, yaitu aktor yang terlibat dalam implementasi Program Bank Sampah di Desa Sambilawang. Dalam penelitian ini subjek yang menjadi narasumber atau informan adalah:

- a. Kasi Manajemen Pengelolaan Sampah dan B3
- b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Staff Kasi Manajemen Pengelolaan Sampah dan B3
- d. Kepala Desa Sambilawang
- e. Ketua Bank Sampah Semut Ijo
- f. Masyarakat umum

#### **1.7.4 Jenis data**

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif berupa kalimat atau narasi yang diperoleh langsung dari catatan lapangan sebagai bentuk dari hasil *interview* dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan. Selain itu, pada penelitian kualitatif sesuai topik yang diangkat peneliti juga melengkapi data lain sebagai berikut, yakni:

- a. Data Tertulis

Merupakan data yang berbentuk uraian atau penjelasan tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya.

- b. Data Gambar

Merupakan data yang berbentuk simbol, peta, gambar, diagram dan lainnya.

c. Data Tabel

Merupakan data yang disajikan dalam bentuk tabel.

Penelitian ini mengkombinasikan dari ketiga jenis data yang telah dipaparkan di atas. Hal ini ditunjukkan untuk mendapatkan data yang relevan dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam proses penelitian.

### **1.7.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif perlu dijelaskan mengenai jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan baik itu melalui data primer maupun data sekunder (Nugrahani, 2014:212). Sumber data dalam penelitian kualitatif meliputi peristiwa, tempat, informan atau narasumber dan teks yang harus ditulis secara rinci.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (dalam Suryani, 2020:73) menyebutkan jika data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti yang berasal dari sumbernya secara langsung. Data ini tidak berbentuk file tetapi langsung diperoleh melalui narasumber atau responden yang dijadikan informan untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti langsung memperoleh informasi dan data dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Sambilawang, Pengurus Bank Sampah serta Masyarakat umum.

## b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (dalam Suryani, 2020:73) menyebutkan bahwa data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti atau pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi pustaka atau bahan informasi lain seperti dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti tidak bertindak langsung memperoleh data dari sumbernya, tetapi peneliti bertindak sebagai pemakai data yang berupa studi literatur yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari laporan penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen dalam Pemerintah Kabupaten Pati, jurnal, internet, pedoman penelitian, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang dapat menunjang laporan penelitian.

### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Marshall dan Rossman (1995:40) menjelaskan bahwa metode kualitatif tertentu menetapkan metode pengumpulan data, sedangkan menurut Sugiyono (dalam Effendy, 2020:707) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang memakan waktu cukup lama dalam keberjalanan sebuah penelitian karena tujuan dari penelitian adalah memperoleh data. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh data tentang topik penelitian. Bila ditinjau dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Umumnya, banyak

sekali teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Namun, upaya untuk mengumpulkan data yang relevan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses menemukan gejala-gejala yang ada dan spesifik dalam mengukur suatu tindakan. Observasi yang digunakan peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur berupa pengamatan yang dilaksanakan telah dirancang secara sistematis untuk mengetahui suatu gejala yang akan diamati, beserta lokasi subyek dan waktu yang akan dilakukan observasi.

b. Wawancara

Melalui proses wawancara tentunya disesuaikan dengan pedoman dan prosedur yang telah disepakati. Proses tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden ditujukan guna memperoleh penjelasan secara mendalam. Teknik wawancara dipilih dalam penelitian ini sebab peneliti membutuhkan kebenaran informasi yang akan diberikan secara langsung oleh narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam bentuk buku, arsip dan dokumen serta laporan lain yang mendukung data penelitian. Dokumen merupakan catatan sebuah kejadian yang telah berlalu berupa gambar, tulisan maupun karya. Melalui

dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data sekunder yang dapat dijadikan pendukung penelitian.

### **1.7.7 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman (dalam Ayuni, dkk 2021:416) yang terdiri atas tiga sub proses, yakni *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusions* (penarikan kesimpulan).

#### **a. Reduksi Data**

Setelah melakukan pengumpulan data dari berbagai narasumber tentu sangat banyak dan beragam, langkah selanjutnya adalah menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data yang terdapat dari catatan lapangan maupun data lainnya. Peneliti akan memilih data-data yang penting lalu dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi program bank sampah di Desa Sambilawang.

#### **b. Penyajian data**

Sesudah melewati tahap reduksi data, proses selanjutnya melakukan penyajian data. Hal ini perlu dilakukan supaya hasil reduksi dapat tersusun dengan baik dan memudahkan para pembaca untuk memahami sebuah penelitian. Menurut Lembaga Penelitian Mahasiswa, penyajian data dapat berupa uraian deskripsi, bagan-bagan atau hubungan antar beberapa kategori, dan lain sebagainya (<https://penalaran-unm.org/penyajian-data-dalam->

[penelitian-kualitatif](#), diakses pada 25 Mei 2021 pukul 15.20 WIB). Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang akurat dan relevan dengan proses menyajikan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai fakta yang terjadi serta untuk menghasilkan penyajian data yang baik dan jelas agar tercapai penelitian kualitatif yang valid. Dengan hal ini, tentunya memudahkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian.

c. Kesimpulan Data

Setelah melewati dua tahapan di atas maka akan ditemukan sebuah kesimpulan mengenai rumusan penelitian yang telah ditentukan terkait peran Dinas Lingkungan Hidup serta faktor penghambat peran dalam implementasi Program Bank Sampah di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

### **1.7.8 Kualitas Data**

Sugiyono (dalam Tanujaya 2017:9) menyatakan bahwa hasil penelitian yang valid merupakan bagian dari uji keabsahan data. Penelitian yang terbukti valid jika terdapat kesamaan antara data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dengan fakta sesungguhnya yang terjadi pada objek yang diteliti. Keabsahan dalam penelitian menggunakan kriteria kredibilitas yang artinya mengandung nilai kebenaran sesuai indikator yang telah ditetapkan sebagai syarat pemenuhan informasi serta hasil penelitian ini nantinya dapat diterima dan dipercaya oleh pembaca dan narasumber yang telah memberikan berbagai informasi sebagai data yang diperlukan dalam proses penelitian. Menurut Gabrielian (1999:5)

menjelaskan bahwa salah satu karakteristik penting dalam penelitian kualitatif adalah kecenderungan triangulasi yang menggunakan lebih dari sumber data atau lebih dari satu perspektif.

Teknik triangulasi ditujukan untuk meninjau hal dari berbagai sudut pandang dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data. Teknik tersebut dipilih agar peneliti memperoleh keabsahan data dari berbagai sudut pandang yang nantinya setelah mendapat data peneliti akan mengecek ulang dengan narasumber yang telah ditentukan lalu membuat kesimpulan atas data yang telah diperoleh. Menurut Denzin (dalam Rahardjo, 2010:2) menyebutkan 4 jenis triangulasi, yakni 1) triangulasi metode, 2) triangulasi peneliti, 3) triangulasi teori, dan 4) triangulasi sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber data, yakni mencari kebenaran sebuah informasi melalui metode sumber perolehan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi dengan membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan berbagi opini antara orang pemerintahan, orang biasa dan yang berpendidikan.